



**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Syaiful Ma'rup

022114087

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

AGUSTUS 2021



**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr.Hendro Sasongko, Ak., M M., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr.Arief Tri Hardiyanto,AK.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.,CSEP.,QIA.)

**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
SUB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2019)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada Hari..... Tanggal...../...../.....

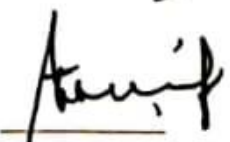
Syaiful Ma'rup
022114087

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr.Retno Martanti Endah Lestari, SE, Msi, CMA, CAPM)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr.Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Ma'rup
NPM : 022114087
Judul Skripsi : Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Agustus 2021



Syaiful Ma'rup
022114087

Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Syaiful Ma'rup. 022114087. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019).
Dibawah bimbingan: Arief Tri Hardiyanto dan Abdul Kohar.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ukuran kinerja perusahaan pada periode tertentu. Salah satu parameter yang digunakan adalah informasi mengenai laba. Tindakan manajemen terhadap laporan keuangan dengan menaikkan laba mengindikasikan adanya praktek manajemen laba (*earnings menegement*) pada perusahaan. Indikator yang digunakan adalah Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak dalam mendeteksi adanya praktek manajemen laba.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Ada 8 perusahaan yang diuji menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 2) Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, 3) Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian selanjutnya hendaknya menganalisis praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak hanya pada beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak, tetapi juga pada komponen lain yang terindikasi terdapat praktek manajemen laba contohnya pada profitabilitas.

Kata kunci : Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Manajemen Laba

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Melalui penulisan ilmiah ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua Orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Abdul Kohar, SE.,M.Ak., CSR., CTCP., CPSP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen – Dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
8. Terimakasih untuk kedua adik saya yang selalu mendukung dan memberikan doa serta menjadi motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu yang tepat.
9. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat yang setia menemani, membantu dan mendukung penulis untuk membuat skripsi ini dari awal sampai selesai.
10. Teman-teman satu perjuangan kelas Malam Akuntansi angkatan 2014, serta teman-teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam melewati suka duka dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, keberkahan dan kebaikan kepada kita semua.
11. Seluruh angkatan 2014 Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Segala masukan, baik kritik maupun saran, penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga apa yang disajikan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Agustus 2021
Penulis

Syaiful Ma'rup
022114087

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritik	8
1.4.2 Kegunaan Akademis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.1 Jenis-jenis Pajak.....	10
2.1.2 Pajak Tangguhan.....	13
2.1.3 Definisi Beban Pajak Tangguhan	16

2.1.4	Penentuan Pajak Tangguhan	19
2.1.5	Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan	20
2.2	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	21
2.2.1	Definisi Perencanaan Pajak	22
2.2.2	Motivasi Perencanaan Pajak	23
2.2.3	Manfaat Perencanaan Pajak	23
2.2.4	Tujuan Perencanaan Pajak	23
2.2.5	Tahapan Membuat Perencanaan Pajak	24
2.2.6	Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik	24
2.2.7	Strategi Perencanaan Pajak.....	25
2.3	Manajemen Laba	26
2.3.1	Teori Manajemen Laba.....	26
2.3.2	Definisi Manajemen Laba.....	27
2.3.2	Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba	27
2.3.3	Motivasi Manajemen Laba	28
2.3.4	Pola dan Teknik Manajemen Laba	29
2.3.5	Model-Model Pendeteksian Manajemen Laba	30
2.4	Penelitian Terdahulu	32
2.5	Kerangka Pemikiran.....	34
2.6	Hipotesis.....	35
2.6.1	Hipotesis Penelitian	35
2.6.2	Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.....	35
2.6.3	Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	36
2.6.4	Hubungan Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	36
BAB 111 METODE PENELITIAN.....		37
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.1.1	Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian.....	37
3.1.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	37
3.2	Operasionalisasi Variabel.....	37

3.3 Metode Penarikan Sampel.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Pengolahan/ Analisis Data	40
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	40
3.5.2 Analisis Regresi Berganda	42
3.5.3 Pengujian Hipotesis	43
BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Pengumpulan Data	45
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	47
4.1.2. Analisis Deskriptif Statistik.....	52
4.2 Analisis Data	53
4.2.1. Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2. Uji Hipotesis.....	57
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
4.2.4. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba.....	62
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	72
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Deteksi Manajemen Laba (Dalam Persentase %)	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	32
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	38
Tabel 3.2 Daftar Perusahaan Jasa <i>Sub Sektor Perdagangan Besar</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 yang dijadikan Objek Penelitian	39
Tabel 4.1 Daftar 44 Perusahaan <i>Sub Sektor Perdagangan Besar</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	45
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Jasa <i>Sub Sektor Perdagangan Besar</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 yang dijadikan Objek Penelitian	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Multikolinieritas	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Run Test	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.8 Hasil Uji t	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.11 Indikator Operasional Variable	62
Tabel 4.12 Beban Pajak Tangguhan (BPT) Perusahaan <i>Sub Sektor Perdagangan Besar</i> periode 2014-2019	64
Tabel 4.13 Tax Retention Rate (TRR) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019	66
Tabel 4.14 Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Mengenai Pengaruh/Peranan Variable X terhadap Variable Y Pada Objek Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	54
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	55
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
Gambar 4.4 Grafik Beban Pajak Tangguhan Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2019	65
Gambar 4.5 Grafik <i>Tax Retention Rate</i> (TRR) perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019	68
Gambar 4.6 Grafik Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Rasio Pajak Tangguhan.....	80
Lampiran 2. Indikator Rasio Perencanaan Pajak	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan oleh perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dalam setiap periode. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berguna sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang dijadikan penilaian untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Tujuan dari penerbitan laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan gambaran kepada pihak eksternal mengenai keadaan yang terjadi dalam suatu perusahaan, baik itu berupa keadaan operasional maupun keadaan finansial perusahaan tersebut, dengan adanya laporan keuangan juga diharapkan dapat membantu para pengguna untuk mengambil keputusan dimana laporan keuangan tersebut menjadi landasan dari keputusan yang diambil.

Salah satu indikator yang memiliki peranan penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laba. Laba yang dihasilkan merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bisnis. Laba perusahaan masih sangat diperhitungkan sebagai informasi yang penting bagi investor dan kreditur serta pemilik perusahaan. Para investor, kreditur, dan pemilik perusahaan dapat mengestimasi kekuatan laba guna mengukur risiko dalam investasi dan kredit. Manajer berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Dalam penelitian Andarumi Mustikaning Perwita Titiek Puji Astuti (2014) mengenai Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013, bahwa banyak manajer yang memanfaatkan celah dari peraturan pajak atau akuntansi untuk merekayasa angka laba (manajemen laba).

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara menaikkan angka laba tetapi juga dengan menurunkan angka laba. Untuk membantu menentukan nilai masa depan dalam penyusunan laporan keuangan manajer membutuhkan penilaian dan perkiraan. Penilaian dan perkiraan tersebut memberikan fleksibilitas pada manajer dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini di atur dalam PSAK No. 1 tentang penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual (*accrual basic*). Fleksibilitas yang tersedia memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Menurut SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No. 1, informasi laba

merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Hal ini membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Informasi laba ini bisa menjadi target rekayasa tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*) (Indriani, 2014). Tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah mendapatkan laba yang tinggi.

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan. (*National Association of Certified Fraud Examiners*, 1993 dalam Hairu, 2009) mengartikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material dan data akuntansi, sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laba (Schipper, 1989 dalam Gunawan et al., 2015). Healy dan Wahlen (1999) dalam Febriyanti et al. (2014) menyatakan bahwa pengertian manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan penilaian (*judgment*), misalnya penilaian yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan penggunaannya mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar. Tindakan manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

Menurut Ali (2014) dalam Ujiyantho (2016), timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan (*agency theory*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principle*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Sebagai pengelola perusahaan lebih banyak Manajer mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham. ;Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada

pemilik yang dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Manajer membutuhkan penilaian dan perkiraan yang berhubungan dengan nilai masa depan dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian dan perkiraan tersebut memberikan fleksibilitas pada manajer dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini diatur dalam PSAK No. 1 tentang penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual (*accrual basic*). Fleksibilitas yang tersedia memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yang wajib diberlakukan untuk pelaporan keuangan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2001. PSAK No. 46 memberikan kebebasan kepada manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan. Pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan diharuskan untuk menyusun perhitungan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Adanya perhitungan laba rugi secara fiskal menimbulkan adanya perbedaan antara laba secara akuntansi dan laba secara fiskal. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan untuk mengetahui adanya koreksi-koreksi yang timbul, sehingga dapat ditelusuri keterkaitan laba akuntansi dengan laba fiskal.

Terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal disebabkan adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi. Perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi dapat bersifat permanen dan dapat bersifat temporer. Perbedaan permanen timbul karena adanya pengakuan secara akuntansi, namun tidak dapat diakui secara fiskal. Untuk perbedaan temporer, timbul karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Adanya perbedaan temporer ini, secara akuntansi akan menimbulkan pendapatan atau beban pajak tangguhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Perusahaan melakukan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

Setiap perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Karena dengan memperoleh laba yang maksimal, keinginan perusahaan dan manajemen dapat tercapai. Alasan peneliti memilih perusahaan yang bergerak dibidang *sub sektor perdagangan besar*, karena perusahaan yang bergerak dibidang *sub sektor perdagangan besar* cukup banyak dilirik oleh para investor untuk menginvestasikan dana milik mereka. Begitupun di Negara-negara maju dan berkembang, pembangunan dan bisnis *sub sektor perdagangan besar* sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini pun terjadi di Indonesia, seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Berikut disajikan Tabel 1.1 Delapan perusahaan *sub sektor perdagangan besar* yang terindikasi melakukan manajemen laba. Dimana peneliti menggunakan ukuran rasio untuk mengetahui laba perusahaan *sub sektor perdagangan besar* pada periode 2014-2019. Manajemen laba dihitung dengan laba bersih tahun ini dikurang laba bersih tahun sebelumnya dibagi kapitalisasi pasar. Dody Frans (2015) nilai deteksi manajemen laba dapat bernilai nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Tabel 1.1
Nilai Deteksi Manajemen Laba (Dalam Persentase %)

No	Kode Emiten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	EPMT	0,28	6,47	-11,50	0,87	24,73	-5,06
2	DUPM	-27,01	44,95	29,20	-62,26	21,08	-15,93
3	JKON	1,45	-6,83	7,51	-0,78	1,20	1,30
4	AKRA	11,99	8,18	7,54	0,57	-5,56	11,23
5	BOGA	12,49	-3,49	6,29	-10,11	4,27	9,92
6	MICE	-11,01	-10,91	22,07	22,47	14,34	38,60
7	APII	-0,20	61,11	-1,81	0,41	3,13	15,51
8	SDPC	2,37	-2,24	1,76	4,38	-10,64	9,82

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat fenomena dimana nilai manajemen laba perusahaan sub sektor perdagangan besar pada periode 2014-2019 mengalami naik

turun yang tidak beraturan yang disebabkan oleh banyak factor dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Factor-faktor tersebut antara lain : Beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, Imbalan Pasca kerja, penyisihan piutang, kestabilan ekonomi, peningkatan pendapatan dan masih banyak lagi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tahun 2015 yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode kena pajak (Sukrisno Agoes 2009).

Menurut Dewi Pindiharti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan akrual terhadap *earning management* (studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba sedangkan aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan.

Menurut Christina (2012) menarik tiga kesimpulan. Pertama, beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Kedua, manajemen selalu merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak atau penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen sebagai peluang “emas” untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang. Ketiga, respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi posisi beban pajak tangguhan.

Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan Pajak (*tax planning*) juga merupakan cara untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak perusahaan yang merupakan keberhasilan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak pada umumnya merujuk kepada proses merakayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak dalam posisi minimal tetapi masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, Indonesia termasuk negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor.

Christina Ranty Sumomba (2012) perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Lucy Citra Fitriany (2016) Perencanaan pajak terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba karena semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba.

Beberapa pihak memandang tindakan manajemen laba dari dua sudut yang berbeda, salah satu pihak beranggapan bahwa manajemen laba merupakan sebuah tindakan kecurangan (*fraud*). Dikatakan sebagai kecurangan karena pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku oportunistis seorang manajer untuk memperlakukan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Sedangkan disisi lain terdapat pihak yang beranggapan bahwa manajemen laba bukan merupakan kecurangan karena hal tersebut merupakan dampak dari kebebasan manajer dalam memilih metode –metode akuntansi yang digunakan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan informasi keuangan yang dianggap sesuai untuk perusahaan. Hal ini disebabkan beragamnya metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles*) (Sulistiyanto, 2008:105).

Seiring dengan berjalannya waktu, penelitian dalam bidang akuntansi mengenai manajemen laba terus berkembang. Penelitian tidak hanya terfokus pada upaya untuk mendeteksi keberadaan, bagaimana, dan konsekuensi dari manajemen laba, tetapi terus meluas menjadi penelitian untuk mengetahui mengapa seorang manajer melakukan aktivitas rekayasa manajerial tersebut. Seperti motivasi apa yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, serta identifikasi mengenai pandangan, pemahaman, dan perilaku etis mengenai manajemen laba tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA” (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019).**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa keterkaitan antara beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba atau *earnings management* yaitu untuk memaksimalkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa laba dan berusaha meminimalkan pajak yang mesti mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah dari yang seharusnya. Pengakuan pajak tangguhan dapat diakibatkan bertambah atau berkurangnya laba bersih karena adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Selain untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan manajemen juga berusaha untuk meningkatkan kinerja dari manajemen agar perusahaan terlihat baik atau sehat dimata pihak eksternal.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 ?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 ?
3. Apakah beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba” Serta informasi yang relevan guna melengkapi teori yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan skripsi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai wadah dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang teorinya sudah didapatkan pada saat di bangku kuliah dalam penerapan ketiga variabel tersebut didalam laporan keuangan.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dan dapat dijadikan tambahan pemahaman dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait beban pajak tangguhan dan manajemen laba pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam Widyawati (2015) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah di terjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Untung Sukardji (2015:1)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh

masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

2.1.1. Jenis-jenis Pajak

A. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan barang kena pajak mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor barang kena pajak mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan barang kena pajak mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan barang kena pajak mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor barang kena pajak mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta wilayah Indonesia.

Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

D. Bea Meterai

Dasar hukum untuk Bea Meterai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan;
3. Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterai-nya belum dilunasi sebagaimana mestinya;
4. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian-kemudian.

E. Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menjelaskan bahwa: “Pemilik atau yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperoleh kepada pemerintah melalui pembayaran pajak yang disebut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”.(Waluyo:2007).

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010), dalam buku Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, menjelaskan bahwa: “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan”.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Peraturan terkait lainnya antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009.

Dalam memori penjelasan UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB disebutkan bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi pajak sebagai alat memasukan penerimaan bagi Negara (fungsi *budgeter* pajak) pemberlakuan BPHTB di latarbelakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan penerimaan Negara, terutama penerimaan daerah, yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini mendasari pemikiran bahwa subjek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan mendapat keuntungan ekonomis dari pemilikan suatu tanah dan bangunan sehingga dianggap wajar apabila diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran BPHTB. Dengan memperhatikan fungsi tanah yang demikian penting bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat ataupun bagi pembangunan, penggalan sumber penerimaan tersebut tentunya akan berarti sekali terutama sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.2 Pajak Tangguhan

Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi dapat juga digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan, dikenakan pajak penghasilan dan untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, subjek pajak yang bersangkutan berkewajiban mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang disediakan oleh instansi pajak.

Penghasilan Kena Pajak (*PKP-Taxable Income*) dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak (*Accounting Income* atau *Pretax Accounting Income* atau *Pretax Book Income*) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan penghasilan untuk keperluan komersial, atau dengan perkataan lain akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut. Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut dengan “PPh terutang – *Income Tax Payable* atau *Income Tax Liability*” sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai “Beban Pajak Penghasilan – *Income Tax Expense* atau *Provision for Income Taxes*.”

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh di masa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa yang akan datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada undang-undang perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada standar akuntansi.

Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (*deferred tax*) baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya (Zain 2008:178).

Menurut Waluyo (2012:273), yaitu: “Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.”

Menurut PSAK No. 46, (IAI, 2015) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak

penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya :

1. Perbedaan temporer dapat dikurangi.
2. Akumulasi rugi pajak belum di kompensasi, dan
3. Akumulasi kredit pajak belum di manfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitugkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah retribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.

Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan). Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya, perbedaan temporer dapat berupa :

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu, perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan, atau;
2. Perbedaan temporer dapat dikurangi yaitu perbedaan temporer yang menimbulkkan jumlah yang dapat dikurangi dalam penentuan laba kerja pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
3. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak aset dari beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

Hal hal yang terkait dengan pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh), menurut UU No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak (WP) dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

2. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP), pengertian penghasilan yang luas adalah semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila satu tahun pajak suatu WP menerima kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita diluar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

3. Penghasilan Kena Pajak (PKP), menurut pasal 16 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Dalam UU PPh dikenal dua golongan subjek pajak, yaitu:

a. Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), bagi WPDN pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan.

b. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), bagi WPLN penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara :

- WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia,

- Wajib Pajak Luar Negeri lainnya.

2.1.3 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272):

Beban pajak tangguhan muncul karena adanya liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer.

Menurut Waluyo (2012:273):

Bahwa pajak tangguhan yaitu sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan menurut Scott dalam Yulianti (2004) “beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.

Selain itu, menurut Zain (2008: 186) kewajiban pajak tangguhan atau beban pajak tangguhan dapat terjadi apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*PSP-Pretax accounting income*) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (*PKP-Taxable income*), maka Beban Pajak (*BP-Tax expense*) akan lebih besar dari Pajak Terutang (*PT-Tax payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*KPT-Deffered tax liability*). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.

Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (*PKP*). Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau *PKP*.

Menurut Zain (2003:199) penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (*PPh*) dengan Pajak Penghasilan (*PPh*) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut ini:

1. Perbedaan Permanen/Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan atau jika ada *PPh* final. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan *Interperiod (Interperiod Income Tax Allocation)*, karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temu atau saldo tandingannya (*counterbalance*).

2. Perbedaan Waktu/Sementara

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu dapat berupa :

a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deferred tax liability*.

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deffered tax asset*.

3. Kompensasi kerugian

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.

4. Kredit pajak investasi

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengkontruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah persentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan sebelum pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang.

Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Alokasi Pajak Interperiode

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah Pajak Penghasilan dibagikan ke:

- a. Penghasilan operasinal berkelanjutan.
- b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut.
- c. Hal-hal luar biasa.
- d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan.

2.1.4 Penentuan Pajak Tangguhan

Pengakuan pada pajak tangguhan untuk kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), yaitu pengakuan aset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan *asset* atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban. Jurnal Pengakuan Pajak Tangguhannya:

<i>Deferred Tax Expense</i>	xxx
<i>Deffered Tax Liabilities</i>	xxx

Adapun metode penangguhan pajak penghasilan dilakukan dengan 3 (tiga) cara dalam Zain (2008:182) yakni:

1. *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*Income Statement Approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

2. *Asset-Liability Method* (Metode Asset dan Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*Balance Sheet Approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer.

3. *Net-of-Tax Method* (Metode Bersih dari Pajak)

Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai asset atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya *deffered method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini

memasukkan alokasi perbedaan temporer yang di komprehensif dan bukan kalkulasi perbedaan temporer yang parsial. Selain dari pada itu, keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah:

1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedangkan dilain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
2. Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau asumsi berkenaan dengan waktu pemulihan Penghasilan Kena Pajak kini maupun pada periode pemulihan atau tarif pajak.
3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban menggunakan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba-rugi perusahaan dan tidak bergabung dalam nilai individu aset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya metode pajak neto.
4. Kelemahan yang serius dari metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang mempersalahkan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas aset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada masalah laporan laba-rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

Selain itu, akuntansi pajak tangguhan hanya berlaku untuk pembukuan komersial yang tidak berpengaruh terhadap pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya/kerugian untuk tujuan penyajian.

2.1.5 Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan } it}{\text{Total Aktiva } t - 1}$$

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Berdasarkan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Phillips et al. (2003) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan. adalah sebagai berikut:

Keterangan :

DTE_{it} = Besaran beban pajak tangguhan perusahaan
i pada tahun. Total Aktiva
t-1 = Total aktiva perusahaan pada tahun sebelumnya

2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Upaya dalam melakukan penghematan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan maka perencanaan pajak dapat dilakukan dengan tujuan untuk dapat diseleksinya jenis tindakan penghematan pajak. Perencanaan pajak dimulai dengan meyakinkan apakah transaksi terkena pajak; jika kejadian tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan / dikurangi jumlah pajaknya, apakah pembayaran pajak dapat ditunda pembayarannya dan sebagainya, dengan tujuan untuk mengefesiansikan beban pajak yang wajib pajak bayarkan.

Menurut Chairil Anwar dalam *tax planning* ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang– undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

Tax Evasion adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang– undang dan peraturan perpajakan.

3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Perencanaan pajak pada dasar hukumnya Chairil Anwar (2013,6) menyatakan bahwa “tidak ada satu ancaman hukuman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin”.

Dalam penelitian ini Perencanaan Pajak diukur dengan menggunakan rumus *Tax Retention Rate* (Tingkat Retensi Pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak.

$$TRR = \frac{\text{Net Income it}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan :

TRR = Tax Retention Rate (Tingkat Retensi Pajak) perusahaan pada tahun t

Net Income it = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax Income = Laba bersih sebelum pajak

2.2.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk penghematan beban pajak perusahaan. Jadi perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh pemerintah dan perencanaan pajak disini bukanlah untuk merugikan penerimaan negara.

Menurut Chairil Anwar (2013:18), menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Menurut Abdul Rahman (2010, 228) “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi”.

Menurut Mohammad Zain (2008, 54) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam keuntungan peraturan perundang- undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang saat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.

Sedangkan Suandy (2008,7) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalkan utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak- pajak lainnya sehingga akan memperoleh laba yang diharapkan sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*), yakni alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan,
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*), yakni kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan- ketentuan yang lain. Tidak jarang pula ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*), yakni tujuannya agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, *loopholes*, *shelters*, dan *havens*.

2.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Chairil Anwar (2015, 20) manfaat dari perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.2.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Pada hakekatnya merencanakan pajak mempunyai tujuan untuk memberikan keuntungan yang baik untuk perusahaan. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.2.5 Tahapan Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Oleh karena itu, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yakni untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
5. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.2.6 Persyaratan Perencanaan Pajak yang Baik

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015, 21) perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan penyelundupan pajak (*tax evasion*).
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arms length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak,

invoice, faktur pajak, PO, dan DO) Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta pembukuannya (*general ledger*).

2.2.7 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013:36) antara lain:

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tariff yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (mengefesiensikan beban pajak secara legal).

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.3 Manajemen Laba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian- kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

2.3.1 Teori Manajemen Laba

1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Menurut Ahmad Elqorni dalam Ghafara Mawaridin (2015) menyatakan bahwa teori agensi (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Masalah keagenan terjadi akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisa mungkin dijalankan oleh para manajer profesional yang sedikit atau tidak sama sekali mempunyai kepemilikan dalam perusahaan itu (kepemilikan saham). Karena adanya pemisahan antara pembuat keputusan dan pemilik perusahaan, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Manajer mungkin saja mencoba untuk mendapatkan gaji yang menguntungkan mereka dan menambah beban bagi para pemegang saham (Marcus Prihminto, 2017).

Teori keagenan juga mengasumsikan adanya asimetri informasi, yaitu dimana agen yang mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi internal perusahaan dari pada prinsipal. Hal ini terjadi karena prinsipal tidak mungkin terus-menerus mengamati setiap tindakan yang dilakukan agen. Oleh karena itu, agen perlu memberikan informasi misalnya berupa laporan keuangan kepada prinsipal secara rutin dan transparan. Namun terkadang tidak seluruh informasi disampaikan agen kepada prinsipal atau bahkan kondisi yang dilaporkan berbeda dengan kondisi kenyataan di lapangan. Jadi agen lebih banyak mengetahui informasi mengenai

perusahaan dari pada pihak lainnya (prinsipal). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal sehingga ini memicu biaya keagenan.

2.3.2 Definisi Manajemen Laba

Belkoui dalam Achmad Daengs (2014, 201) menyatakan bahwa *earnings management* adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang.

Menurut Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan *earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya.

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialih bahasakan oleh Aurolla Saparini Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut “Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.3.3 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu :

1. Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan

tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

2.3.4 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008, 63) motivasi manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. *Bonus Scheme Hypothesis*

Kompensasi (Bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja, atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO).*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam *prospectus* mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

2.3.5 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

1. Peningkatan laba (*income increasing*)

Peningkatan laba (*income increasing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

2. Penurunan laba (*income decreasing*)

Penurunan laba (*income decreasing*) adalah upaya perusahaan mengatur laba periode berjalan menjadi lebih rendah dari pada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

3. Perataan laba (*income smoothing*)

Perataan laba (*income smoothing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar dari pada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

2.3.6 Model-Model Pendeteksian Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba biasanya diteliti dengan cara pembentukan hipotesa oleh peneliti kemudian manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan penggunaan metode yang tepat.

Secara umum ada tiga cara yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba yaitu :

1. Model berbasis *Aggregate Accruals*

Model berbasis *aggregate accruals* yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.

a. The Healy Model (1985)

Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Alasan penggunaan total akrual adalah sebagai berikut :

- Total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik itu menaikkan maupun menurunkan laba.
- Total akrual mencerminkan keputusan manajemen, yaitu untuk menghapus aset, pengakuan atau menunda pendapatan dan menganggap biaya atau modal suatu pengeluaran.

b. The De Angelo Model (1986)

Model ini untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode bersangkutan atau dirumuskan sebagai berikut :

$$TAC = Net\ income - Cash\ flows\ from\ operations$$

Model De Angelo mengukur atau memproksi manajemen laba dengan nondiscretionary accrual, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya.

2. Model Berbasis *Specific Accruals*

Model yang berbasis accruals (*specific accruals*) yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen keuangan tertentu dari industry tertentu atau cadangan kerugian piutang industri asuransi (Sulistyanto,2008)

3. Model Berbasis *Distribution of Earning After Management*

Model *Distribution of Earning After Management* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel, dan Zechauer, serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi pada pergerakan laba disekitar benchmark yang

dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidak berlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat (sulistyanto,2008)

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba berdasarkan *scaled earnings changes*. Adapun rumus untuk mengukur manajemen laba adalah sebagai berikut:

$$\text{Scaled Earnings Changes} = \frac{\text{Net Income } it - \text{Net Income } i (t - 1)}{\text{MVE } (t - 1)}$$

Keterangan :

Net income it = Laba perusahaan i pada tahun t.

Net income (t-1) = Laba perusahaan i pada tahun tahun sebelumnya.

MVE (t-1) = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun sebelumnya.

Market Value of Equity diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar perusahaan i pada akhir tahun t-1 dengan harga saham perusahaan i pada akhir tahun t-1.

$$\text{MVE} = \text{Jumlah saham beredar } (t-1) \times \text{harga saham}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan manajemen laba, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Fatchan Achyani (2019) Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Independen : Perencanaan Pajak Dependen: Manajemen Laba	Perencanaan Pajak Beban Pajak Tangguhan Aset Pajak Tangguhan Kepemilikan Manajerial Free Cash Flow	Metode analisis regresi linear berganda	Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Budi Setyawan (2016) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Manufaktur Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	Independen : Beban Pajak Tangguhan Profitabilitas Perencanaan Pajak Dependen : Manajemen laba	Beban Pajak Tangguhan Profitabilitas Perencanaan Pajak Manajemen laba ROA	Analisis Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Regresi Uji Hipotesis.	Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba
3	A.A. Gede Raka Plasa Negara (2017) Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan	Independen : Perencanaan pajak Beban pajak tangguhan	Perencanaan pajak Beban pajak tangguhan Manajemen	Metode Statistik Deskriptif dan metode regresi logistik	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba,

	Terhadap Manajemen Laba	Dependen : Manajemen laba	:laba		beban positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.
4	Vincent Junery (2016) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Bank Dan Lembaga Keuangan Yang Terdaftar Di Bei 2010-2013)	Dependen : Beban Pajak Tangguhan Beban Pajak Kini Kompensasi Manajemen Dependen : Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan Beban Pajak Kini Kompensasi Manajemen Manajemen Laba	Uji estimasi Non-Discretionary Accruals Uji statistik deskriptif	Beban Beban Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5	Dwi Perwira Sianturi (2016) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Non manufaktur subsektor pertambangan batu Bara yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Dependen : Beban Pajak Tangguhan Perencanaan Pajak Dependen : Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan Perencanaan Pajak Manajemen Laba	Uji asumsi klasik Analisis regresi Analisis korelasi Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t Analisis koefisien determinasi	Beban

2.5 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen (beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak) terhadap variabel dependen (manajemen laba).

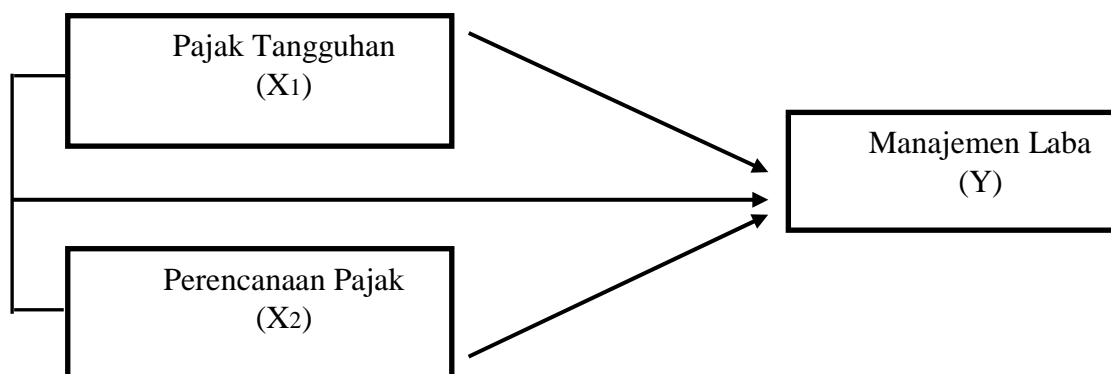
1. Beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, keadaan tersebut didukung pula dengan kelonggaran yang diberikan oleh SAK kepada perusahaan untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan komersial. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba dengan melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif. Koreksi negatif merupakan keadaan dimana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar dari pada akuntansi komersial. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Selain itu, semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Artinya, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.

2. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Jadi dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk dapat

memperoleh keuntungan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku.

3. Dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini



Gambar 1

Kerangka Pemikiran mengenai pengaruh/peranan Variabel X terhadap Variable Y Pada Objek Penelitian

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.

2.6.1 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

Hipotesis 2 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

Hipotesis 3: Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.6.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Sesuai yang sudah di bahas sebelumnya Menurut Waluyo (2012:273):

Bahwa pajak tangguhan yaitu sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya

kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.

2.6.3 Hubungan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan definisi yang sebelumnya sudah dibahas dapat bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalkan utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya sehingga akan memperoleh laba yang diharapkan sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.6.4 Hubungan Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya dalam bab 1, menjelaskan bahwa, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tahun 2015 yang mengatur mengenai pajak penghasilan. Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode kena pajak (Sukrisno Agoes 2009:243).

Pihak manajemen berkeinginan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008). Perencanaan Pajak (*tax planning*) juga merupakan cara untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak perusahaan yang merupakan keberhasilan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak pada umumnya merujuk kepada proses merakyasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak dalam posisi minimal tetapi masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap variabel dependen yakni manajemen laba pada perusahaan jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

3.1.1 Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen.

Unit analisis pada penelitian ini yaitu berupa organisasi (*organization*), yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi/ perusahaan jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisisnya adalah laporan keuangan.

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.1.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, jadi penulis mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) jurnal akuntansi, situs resmi dan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

- 1) Variabel Independen (X)
 - a. Beban pajak tangguhan (X_1)

Beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak), dimana laba akuntansi cenderung lebih besar dari laba fiskal.

b. Perencanaan pajak (X_2)

Perencanaan pajak (*tax planning*) yakni langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Wijaya dan Martani, 2011).

2) Variabel Dependen (Y)

Manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Rumus untuk variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan pendekatan distribusi laba

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Beban Pajak tangguhan • <i>Deffered Tax Expenses (DTEit)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Beban Pajak tangguhan • Total Aset 	$\frac{\text{Beban pajak tangguhan pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t - 1}$	Rasio
Perencanaan Pajak • <i>Tax Retention Rate (TRR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Income</i> • Laba bersih sebelum pajak (EBIT) 	$\frac{\text{Net Income } it}{\text{Pretax Income } Le (EBIT)}$	Rasio
Manajemen Laba • <i>Scaled Earnings Changes</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Income</i> • <i>Market Value of Equity</i> (jumlah saham beredar X harga saham) 	$\frac{\text{Net Income } it - \text{Net Income } i (t - 1)}{\text{MVE } (t - 1)}$	Rasio

3.3 Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasinya). Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah

penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2019.
2. Perusahaan yang melaporkan laba positif selama periode penelitian.
3. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).
4. Perusahaan melaporkan beban pajak tangguhan pada tahun-tahun tertentu, yaitu antara tahun 2014-2019 dan memiliki nilai kapitalisasi pasar selama tahun penelitian.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 44 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019, dan Peneliti menarik 8 perusahaan yang terindikasi melakukan manajemen laba untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.2

Daftar perusahaan jasa *Sub Sektor Perdagangan Besar* terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 yang dijadikan objek penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	EPMT
2	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DUPM
3	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
4	PT AKR Corporindo Tbk	AKRA
5	PT Bintang Oto Global Tbk	BOGA
6	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
7	PT Arita Prima Indonesia Tbk	APII
8	PT Millennium Pharmacon International Tbk	SDPC

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis)

3.4 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara penelitian data sekunder sebagai berikut:

1) Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan yakni riset dengan mengumpulkan bahan atau data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku, jurnal akuntansi. Riset kepustakaan juga mempelajari literatur-literatur serta membaca catatan perkuliahan yang berhubungan permasalahan

untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisa yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2) Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara menggandakan data yang ada atau dengan cara membuat salinan (men-*download*) laporan keuangan emiten yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui akses www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengolahan/ Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS. SPSS merupakan sebuah program untuk olah data statistik yang paling populer dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Namun untuk mendapatkan model yang baik maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linear berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolienaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov)

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal.

Uji normalitas salah satunya dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov smirnov.

Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji Kolmogorov Smirnov dipilih dalam penelitian ini karena uji ini dapat secara statistik atau tidak.

1. Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau

mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji Multikolienaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolienaritas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolienaritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolienaritas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolienaritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolienaritas.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolienaritas adalah sebagai berikut :

- a. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
- b. Menambah jumlah observasi.
- c. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan ZRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti

mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji Glejser, Uji Park atau Uji White. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan

melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan ($4-du$) maka koefisien autokorelasi $=0$, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl) maka koefisien autokorelasi >0 , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari ($4-dl$) maka koefisien autokorelasi <0 , berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara ($4-du$) dan ($4-dl$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lain dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas sehingga data observasi menjadi berkurang satu.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. (Indrianto dan Bambang, 2002:211)

Output coefficients yang menunjukkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independen sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen, dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Setelah disajikan hasil analisis regresi linear berganda, kemudian akan disajikan pula hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the estimate*).

Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Manajemen Laba
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

- X_1 : Beban Pajak Tangguhan
 X_2 : Perencanaan pajak
 ε : Error

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linear berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Pengujian secara parsial (Uji t)

Menurut Dajan (1994), uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara parsial. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji t adalah:

- a. Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya.
(H_1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Pilih taraf nyata tingkat signifikan (α)
- c. Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
- d. Melakukan uji t dengan metode perbandingan antara t hitung dengan t_{tabel} .
Nilai $t_{tabel} = t$
 - 1) (H_1) ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - 2) (H_1) diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- e. Melakukan uji t dengan dasar probabilitas
 - 1) (H_1) ditolak apabila nilai $P > 0.05$
 - 2) (H_1) diterima apabila nilai $P < 0.05$

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara

membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- a. Merumuskan hipotesis dan alternatifnya
(H1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
 - b. Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α) Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau $\alpha = 5\%$
 - c. Melakukan uji F dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Dimana nilai $F_{tabel} = F_{\alpha k (n-k-1)}$
 - 1) (H1) ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$
 - 2) (H1) diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
 - d. Melakukan uji F dengan berdasarkan probabilitas.
 - 1) (H1) ditolak apabila $P > 0.05$
 - 2) (H1) diterima apabila $P < 0.05$
 - e. Membuat kesimpulan.
3. Uji Determinasi (R^2)
- Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:
- a. Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
 - b. Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
 - c. Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen Terhadap variable dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba”. Data yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* atau penentuan sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap perusahaan-perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019.

Dalam penelitian ini total perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019 berjumlah 44 perusahaan dan perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 8 perusahaan hasil tersebut didapatkan dari pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 4.1

Daftar 44 Perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar*
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

No	Nama Emiten	Kode Perusahaan
1	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	AIMS
2	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	EPMT
3	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DUPM
4	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
5	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
6	PT AKR Corporindo Tbk	AKRA
7	PT Arita Prima Indonesia Tbk	APII
8	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR
9	PT Bintang Oto Global Tbk	BOGA
10	PT Industri dan Perdagangan Bintr Tbk	CARS

No	Nama Emiten	Kode Perusahaan
11	PT Colorpak Indonesia Tbk	CLPI
12	PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk	CNKO
13	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DPUM
14	PT Dwi Guna Laksana Tbk	DWGL
15	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	EPMT
16	PT FKS Multi Agro Tbk	FISH
17	PT Evergreen Invesco Tbk	GREN
18	PT Himalaya Energi Perkasa Tbk	HADE
19	PT Hexindo Adiperkasa Tbk	HEXA
20	PT HK Metals Utama Tbk	HKMU
21	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	INPS
22	PT Intraco Penta Tbk	INTA
23	PT Inter Delta Tbk	INTD
24	PT Leo Investments Tbk	ITTG
25	PT Kobexindo Tractors Tbk	KOBX
26	PT Perdana Bangun Pusaka Tbk	KONI
27	PT Lautan Luas Tbk	LTLS
28	PT Modern Internasional Tbk	MDRN
29	PT Multi Indocitra Tbk	MICE
30	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	MPMX
31	PT Ancora Indonesia Resources Tbk	OKAS
32	PT Millennium Pharmacon International Tbk	SDPC
33	PT Surya Pertiwi Tbk	SPTO
34	PT Renuka Coalindo Tbk	SQMI
35	PT Sugih Energy Tbk	SUGI
36	PT Tigaraksa Satria Tbk	TGKA
37	PT Tira Austenite Tbk	TIRA
38	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	TMPI
39	PT Triwira Insanlestari Tbk	TRIL

No	Nama Emiten	Kode Perusahaan
40	PT Tunas Ridean Tbk	TURI
41	PT United Tractors Tbk	UNTR
42	PT Wahana Pronatural Tbk	WAPO
43	PT Wicaksana Overseas Internation Tbk	WICO
44	PT Zebra Nusantara Tbk	ZBRA

Tabel 4.2

Daftar 8 Perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi Objek Penelitian.

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	EPMT
2	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	DUPM
3	PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	JKON
4	PT AKR Corporindo Tbk	AKRA
5	PT BintangOtoGlobal Tbk	BOGA
6	PT MultiIndocitra Tbk	MICE
7	PT Arita Prima Indonesia Tbk	APII
8	PT MillenniumPharmacon InternationalTbk	SDPC

(Sumber : www.idx.co.id diolah oleh penulis)

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

Berikut ini merupakan gambaran umum perusahaan-perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019 yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini :

1. PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT)

PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) didirikan tanggal 26 Oktober 1988 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1993. Kantor pusat EPMT beralamat di Jalan Pulo Lentut No. 10, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Saat ini (30/09/15), Enseval memiliki 46 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Induk usaha Enseval Putera Megatrading Tbk adalah Kalbe Farma Tbk (KLBF) (menguasai 91,75% saham Enseval), yang didirikan di Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan EMPT meliputi usaha dalam bidang perdagangan umum dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau keagenan, sedangkan kegiatan usaha penunjang Perusahaan meliputi usaha dalam bidang pengangkutan umum, industri dan jasa. Kegiatan usaha utama Enseval adalah sebagai distributor dan pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik dan barang dagang lainnya.

Pada tanggal 28 Juni 1994, EPMT memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham EPMT (IPO) kepada masyarakat sebanyak 12.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 01 Agustus 1994.

2. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM)

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) didirikan tanggal 09 Mei 2012, dimana sebelumnya berbentuk CV dengan nama CV Dua Putra Dewa. Kantor pusat DPUM berlokasi di Jalan Raya Pati – Juwana km 7. Kabupaten Pati. Jawa Tengah 59111 dan kantor perwakilan (korespondensi) terletak di Gedung Nariba Office Suites & Pavilion, Lantai 6, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 39, Jakarta Selatan 12790 – Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Dua Putra Utama Makmur Tbk, yaitu: PT Pandawa Putra Investama (50,47%), UOB Kay Hian Pte. Ltd. (22,32%) dan DPP Inhouse 1 (6,20%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DPUM adalah bergerak dalam bidang industri perikanan dan perdagangan. Kegiatan utama DPUM adalah bergerak dalam bidang perikanan terpadu, perdagangan & pengolahan hasil laut dengan memiliki fasilitas produksi berupa cold storage, contact freezer, tunnel freezer, freezer truck, laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya. Hasil produksi berupa semua jenis ikan laut, udang laut, udang tambak, cumi dan gurita.

Pada tanggal 26 Nopember 2015, DPUM memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DPUM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.675.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp550,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Desember 2015.

3. PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (JKON)

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) didirikan tanggal 23 Desember 1982 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1982. Kantor pusat Jaya Konstruksi berlokasi di Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330 – Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Jaya Konstruksi Manggala

Pratama Tbk, antara lain: PT Pembangunan Jaya (induk usaha) (60,89%) dan UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus (5,28%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan JKON adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Kegiatan utama Jaya Konstruksi adalah bertindak sebagai pengembang; pemborong pada umumnya (general contractor); pemasangan komponen bangunan (berat/heavy-lifting); pembangunan konstruksi segala bangunan; pemasangan instalasi; pengembangan wilayah pemukiman; pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi; pemborong bidang pertambangan umum; pemborong bidang petrokimia; pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi; konstruksi besi dan baja; pembangunan lapangan golf; penyelenggaraan proyek jalan tol; konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api; usaha penunjang ketenagalistrikan.

Pada tanggal 26 Nopember 2007, JKON memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham JKON (IPO) kepada masyarakat sebanyak 300.00.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp615,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 Desember 2007.

4. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

AKR Corporindo Tbk (AKRA) didirikan di Surabaya tanggal 28 Nopember 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978. Kantor pusat AKRA terletak di Wisma AKR, Lantai 7-8, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 – Indonesia.

Induk usaha dan induk usaha terakhir AKR Corporindo Tbk adalah PT Arthakencana Rayatama, yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikoesoemo.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha AKRA antara lain meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan (termasuk untuk pemakaian sendiri dan mengoperasikan transportasi baik melalui darat maupun laut serta pengoperasian pipa penunjang angkutan laut), penyewaan gudang dan tangki termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum.

Saat ini, AKR Corporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi produk bahan bakar minyak (BBM) ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti caustic soda, sodium sulfat, PVC resin dan soda ash) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistik lainnya.

Pada bulan September 1994, AKRA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AKRA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 15.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp4.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Oktober 1994.

5. PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA)

Bintang Oto Global Tbk (BOGA) didirikan tanggal 29 September 2011 dengan nama PT Sumber Utama Niaga. BOGA berkantor pusat di Jl. S. Supriadi No. 19- 22 Sukun, Malang, Jawa Timur – Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bintang Oto Global Tbk, yaitu: PT Sinar Solusindo Sejahtera (42,11%) dan PT Sumber Solusindo Sejahtera (10,53%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BOGA adalah bergerak di bidang perdagangan dan investasi pada entitas anak yang bergerak pada bidang perdagangan kendaraan, suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan kendaraan serta penyewaan kendaraan. Saat ini, kegiatan utama PT Bintang Oto Global adalah perusahaan otomotif terintegrasi yang memiliki lini usaha dealership, auto rental, auto service dan used car retailer. Mobil yang dipasarkan adalah mobil Honda. Pada tanggal 08 Desember 2016, BOGA memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BOGA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp103,- per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak 630.000.000 dengan pelaksanaan sebesar Rp110,- per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Desember 2016.

6. PT Multi Indocitra Tbk (MICE)

PT Multi Indocitra Tbk (dahulu PT Modern Indocitra) (MICE) didirikan 11 Januari 1990 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Kantor pusat MICE berlokasi di Green Central City Commercial Area, Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 – Indonesia, dengan kantor cabang di Surabaya, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Multi Indocitra Tbk, antara lain: PT Buana Graha Utama (44,81%), Surono Subekti (7,85%) dan Sukarto Bujung (6,80%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MICE adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi (merek Pigeon), produk perawatan kesehatan kosmetika (merek AIBU dan Astalift), lampu hemat energi dengan jenis CFL (Compact Fluorescent Lamp) dan LED (Lighting Emitting Diode) (merek HORI).

Pada tanggal 09 Desember 2005, MICE memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MICE (IPO) kepada masyarakat sebanyak 100.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp490,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Desember 2005.

7. PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII)

Berdiri sejak tanggal 05 Oktober 2000 di Jakarta, Indonesia, PT Arita Prima Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi, dan servis untuk produk valve, fitting, instrumentation, serta control. Melalui performa prima yang senantiasa kami tingkatkan dari waktu ke waktu, telah mengantarkan Arita sebagai perusahaan valve yang pertama Go Public dan satu-satunya di Indonesia pada tahun 2013. Jaringan internasional yang luas membuat Arita menjadi perusahaan terdepan di bidangnya. Arita merupakan jembatan bagi customer Indonesia untuk mendapatkan produk-produk berkualitas dari seluruh dunia, antara lain JF Arita, Bells, Q-Flex, Clorius, Ari Armaturen, Thermo, ANS dan masih banyak lagi. Memasuki usia 17 tahun di Indonesia, Arita kini telah menjadi penyedia produk pendukung berbagai industri, mulai dari minyak & gas, kelapa sawit, perkapalan, oleochemical, pengolahan air, petrochemical, bangunan, pertambangan, hingga energi. Didukung oleh 34 cabang dan 12 divisi penjualan di seluruh Indonesia yang berlokasi di kota-kota terbesar dan strategis di Indonesia, Arita hadir dengan sistem distribusi yang luas sehingga mampu menjangkau pelanggan lebih mudah

8. PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC)

PT Millennium Pharmacon International Tbk (sebelumnya NVPD Soedarpo Corporation Tbk) (SDPC) didirikan 20 Oktober 1952 dengan nama N.V. Perusahaan Dagang Soedarpo Corporation dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Oktober 1952. Kantor pusat SDPC berlokasi di Panin Bank Centre Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dan memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Millennium Pharmacon International Tbk, yaitu: Pharmaniaga International Corporation Sdn. Bhd., Malaysia (induk usaha) (55,00%), PT Danpac Pharma (23,87%) dan PT Danpac Pharma (5,87%). Induk usaha terakhir Millennium Pharmacon International adalah Boustead Holdings Bhd., Malaysia. Pada tanggal 22 Maret 1990, SDPC memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SDPC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.600.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 07 Mei 1990.

4.1.2. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata. Tabel 5 berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen yaitu Beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba (X1) dengan indikator Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba (X2) dengan indicator Beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. (Y) dengan indikator *scaled earnings change*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BPT	48	-.03	.00	-.0038	.00843
TRR	48	.48	27.41	1.7415	4.24609
EM	48	-.62	.64	.0408	.21443
Valid N (listwise)	48				

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 sampel, jangka waktu pengambilan sampel selama 5 tahun, maka N=48.

Nilai Beban pajak tanggungan (X₁) adalah minimum sebesar -0,03%, maksimum sebesar 0,00%, rata-rata sebesar -0,003% dan Standar deviation sebesar 0,004. Perencanaan pajak (X₂) adalah minimum sebesar 0,48%, maksimum sebesar 27,41%, rata-rata 1,74%, dan Standar deviation 4,246 Selain itu diketahui bahwa nilai Manajemen Laba (Y) adalah minimum sebesar -0,62%, maksimum sebesar 0,64%, rata-rata sebesar 0,04% dan Standar deviation sebesar 0,2144.

4.2. Analisis Data

Dalam menguji “Pengaruh Beban Pajak Tanggungan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 24.0. Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu Beban Pajak Tanggungan (X₁), Perencanaan Pajak (X₂) dan Manajemen Laba (Y). Selanjutnya dilakukan beberapa uji asumsi klasik.

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased Estimator*), uji ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam menentukan normal atau tidaknya suatu distribusi data dapat ditentukan berdasarkan nilai signifikan yaitu dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov. Nilai Signifikan $> 0,05$ menunjukkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

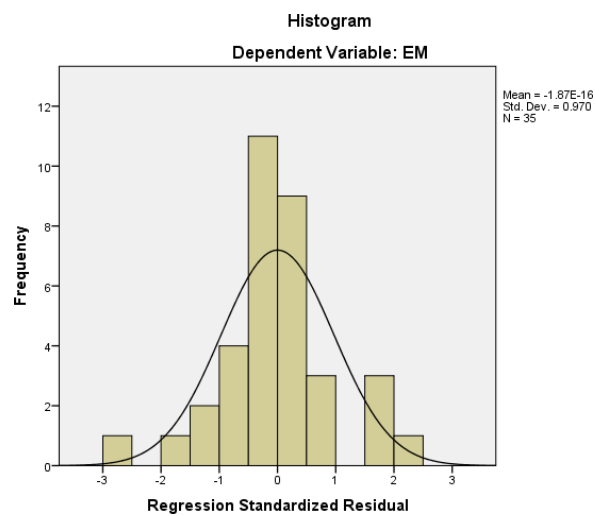
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11841003
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.113
	Negative	-.138
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tingkat signifikan adalah 0,089 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Semua variabel independen beserta variabel independen memiliki Nilai Sig $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data yang telah diambil untuk diteliti oleh penulis adalah normal.

Sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dibuktikan sebagai berikut :

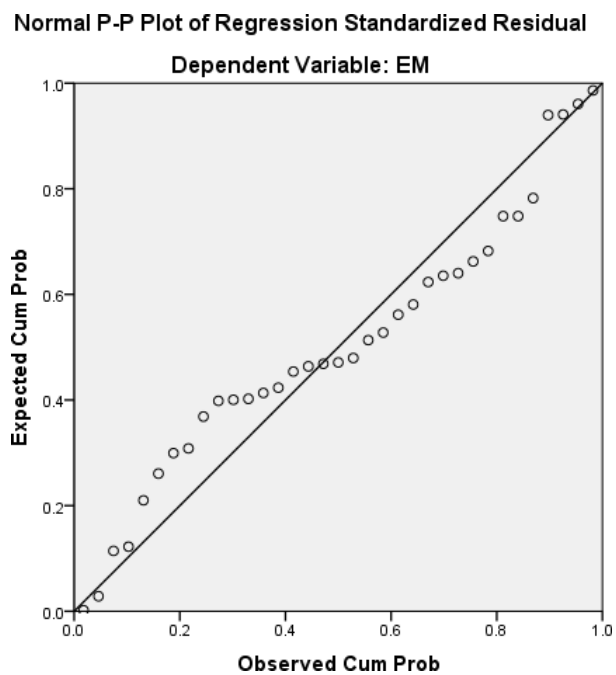
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa grafik berbentuk lonceng atau (*bell shaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal.



Gambar 4,1

Hasil Uji Normalitas Histogram

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa grafik berbentuk lonceng atau (*bell shaped*), artinya bahwa data residual terdistribusi dengan normal.



Gambar 4.2

Hasi Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis, dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala korelasi diantara variabel-variabel independen dalam satu model regresi. Suatu model regresi yang baik akan bebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas jika Nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Hasil dari uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut :

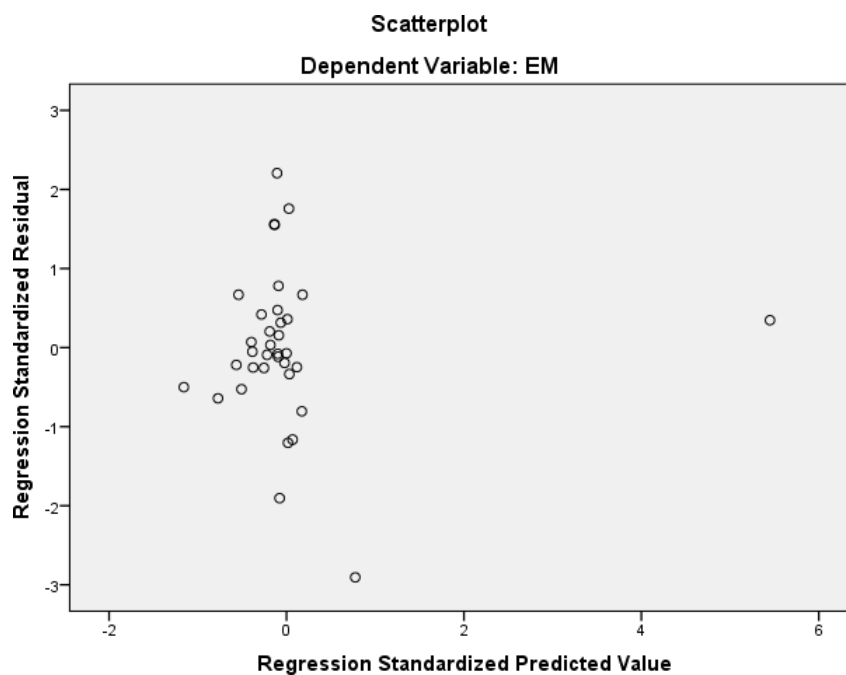
Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Multikolinearitas

Model	Unstandardized		Standardized		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-.042	.035			-1.207	.236		
BPT	2.330	3.773	.095		.618	.541	.982	1.018
TRR	.075	.024	.482		3.130	.004	.982	1.018

Dari hasil uji multikolinearitas di atas nilai Tolerance untuk variabel Beban Pajak Tangguhan sebesar $0,982 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,018 < 10$, dan nilai Tolerance untuk variabel Perencanaan Pajak sebesar $0,982 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,018 < 10$. Maka dalam model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.



Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar dengan pola yang tidak jelas, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik memiliki syarat yakni tidak terjadi autokorelasi didalamnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan (*error*) suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan uji *Run Test* dengan taraf signifikan 0,05. Syarat tidak adanya autokorelasi yaitu jika $Asymp.sig.(tailed-2) > 0,05$. Berikut hasil dari uji autokorelasi pada tabel 4.5 :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00550
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	22
Z	-,298
Asymp. Sig. (2-tailed)	,765

a. Median

Tabel menunjukkan nilai *Asymp.sig.(tailed-2)* sebesar 0,765. Hasil uji menggunakan *Run Test* menunjukkan $0,765 > 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Uji hipotesis terdiri dari analisis uji koefisien determinasi (R^2), uji koefisien regresi secara parsial. Uji hipotesis bertujuan untuk (Uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F).

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak) secara serentak terhadap variabel dependen (Manajemen Laba). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1, nilai R^2 yang kecil memiliki arti yaitu kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.504 ^a	.254	.207	.12205

a. Predictors: (Constant), TRR, BPT

b. Dependent Variable: EM

Hasil tabel 4.6 di atas menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*), antara lain:

1) Nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,504. Artinya korelasi atau hubungan antara variabel Beban Pajak Tangguhan dan *Tax Retention Rate* terhadap Manajemen Laba yang diproksikan oleh *Scaled Earnings Change* sebesar 0,504 atau 50,4%. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat (kuat) karena nilai mendekati 1.

2) Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,254. Menunjukkan bahwa variasi dari Manajemen Laba yang diproksikan oleh *Scaled Earnings Change* dapat diterangkan oleh BPT dan TRR sebesar 0,254 atau sebesar 25,4% sedangkan sisanya sebesar 74,6% (100%-25,4%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.

3) Nilai *Adjusted RSquare* adalah sebesar 0,207. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi setiap variabel independen (BPT dan TRR) mampu menjelaskan variabel dependen Manajemen Laba yang diproksikan oleh *Scaled Earnings Change* sebesar 0,207 atau 20,7% sedangkan sisanya sebesar 79,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

4) *Std. Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,12205. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi manajemen laba sebesar 0,12205. Semakin kecil nilai *Std. Error of the Estimate* maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

b. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Nilai t_{tabel} dicari pada signifikan $0,05/2=0,025$ (uji dua sisi) dengan $df=n-k-1$ atau $df= 40-2-1=37$. Hasil dari uji t disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.042	.035		-1.207	.236
	BPT	2.330	3.773	.095	.618	.541
	TRR	.075	.024	.482	3.130	.004

Analisis Uji t berdasarkan Tabel 4.7 adalah sebagai berikut :

1) Beban Pajak Tangguhan (X1) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel beban pajak tangguhan (X1) memiliki nilai signifikan 0,541 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,541 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara taraf nyatanya dengan hasil uji t, dimana nilai taraf nyatanya sebesar 0,618 dan hasil uji t yaitu sebesar 2.02619 maka (taraf nyatanya < hasil uji t) ($0,618 < 2.02619$). Oleh karena itu, variabel beban pajak tangguhan yang dihitung menggunakan indikator BPT tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

2) Perencanaan Pajak (X2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel Perencanaan Pajak (X2) memiliki nilai signifikan 0,004 kurang dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,004 < 0,05$). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara thitung dengan ttabel, dimana nilai thitung sebesar 3,130 dan ttabel yaitu sebesar 2.02619 maka (thitung > ttabel) ($3,130 > 2.02619$). Oleh karena itu, variabel perencanaan pajak yang dihitung menggunakan indikator TRR memiliki pengaruh secara parsial terhadap manajemen laba.

c. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F atau Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika nilai Fhitung > Ftabel atau jika nilai signifikannya < 0,05. Hasil uji F disajikan pada tabel 4.9 :

Tabel 4.9
Uji Koefisien Regresi Secara Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.162	2	.081	5.444	.009 ^b
Residual	.477	32	.015		
Total	.639	34			

a. Dependent Variable: EM

b. Predictors: (Constant), TRR, BPT

Berdasarkan analisis uji F pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai sig yaitu 0,009 dan F hitung sebesar 5,444. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% , $\alpha=5\%$ df 1(jumlah variabel-1) atau $(3-1)=2$ dan df2 $(n-k-1)$ atau $40-2-1=37$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil perolehan untuk Ftabel sebesar 3,25. Dengan demikian, nilai Fhitung > Ftabel atau $5,444 > 3,25$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen penelitian ini yaitu Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Hasil uji analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.10 :

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-.042	.035				-1.207
BPT	2.330	3.773	.095	.618	.541	.982	1.018
TRR	.075	.024	.482	3.130	.004	.982	1.018

a. Dependent Variable: EM

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -0,042 + 2,330 + 0,075 + e$$

Dari hasil persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta

Konstanta sebesar (-0,042) artinya jika semua variabel independen dianggap konstan bernilai 0 maka manajemen laba bernilai (-0,042).

2. Koefisien Regresi Variabel Beban Pajak Tangguhan

Nilai koefisien regresi beban pajak tangguhan (b_1) bernilai positif sebesar 2,330. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan yang searah dengan manajemen laba. Artinya apabila beban pajak tangguhan naik sebesar 1 satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka manajemen laba akan mengalami kenaikan sebesar 2,330.

3. Koefisien Regresi Variabel Perencanaan Pajak

Nilai koefisien regresi perencanaan pajak (b_2) bernilai positif sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa akrual memiliki hubungan yang searah dengan manajemen laba. Artinya apabila perencanaan pajak naik sebesar 1 satuansedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka manajemen laba akan mengalami kenaikan sebesar 0,075.

4.2.4 Pengaruh Beban Pajak Tanggahan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Indikator analisis beban pajak tanggahan dan perencanaan pajak yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio beban pajak tanggahan (BPT), dan rasio perencanaan pajak yaitu *Tax Retention Rate* (TRR) pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. Berikut data indikator yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan pada tabel 4.11:

Tabel 4.11

Indikator Operasionalisasi Variabel Variabel Beban Pajak Tanggahan

Dalam Jutaan rupiah	Beban pajak tanggahan					
Kode Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EPMT	671.991	4.603	43.440	44.358	39.982	57.648
DUPM	38	83	71	1.561	2.031	110.481
JKON	45.670	58.361	70.407	44.398	51.919	43.457
AKRA	46.760	37.322	12.262	18.073	18.582	24.401
BOGA	39.706	41.143	33.455	55.889	53.293	50.284
MICE	11.521	9.846	8.924	10.251	8.746	9.617
APII	7.630	5.455	4.290	5.026	4.240	5.296
SDPC	9.193	8.575	7.713	11.140	11.232	8.186

Dalam Jutaan rupiah	Aktiva tetap					
Kode Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EPMT	6.005.123	6.474.936	7.087.269	7.425.800	8.322.960	8.704.958
DUPM	310.942	1.575.467	1.686.051	2.079.476	2.106.989	1.820.802
JKON	3.844.756	2.775.957	4.007.387	4.202.515	4.804.256	4.928.108
AKRA	14.792	15.203	15.831	16.823	19.941	21.409
BOGA	125.604	167.598	431.920	520.241	571.901	579.936
MICE	664.178	761.521	848.612	863.182	928.832	1.039.470
APII	439.888	421.872	407.985	423.181	450.303	490.860
SDPC	529.991	663.217	733.443	938.005	1.192.891	1.230.844

Variabel Perencanaan Pajak

Dalam Jutaan rupiah	Beban pajak tangguhan					
Kode Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EPMT	671.991	4.603	43.440	44.358	39.982	57.648
DUPM	38	83	71	1.561	2.031	110.481
JKON	45.670	58.361	70.407	44.398	51.919	43.457
AKRA	46.760	37.322	12.262	18.073	18.582	24.401
BOGA	39.706	41.143	33.455	55.889	53.293	50.284
MICE	11.521	9.846	8.924	10.251	8.746	9.617
APII	7.630	5.455	4.290	5.026	4.240	5.296
SDPC	9.193	8.575	7.713	11.140	11.232	8.186

Variabel Manajemen Laba

Dalam Jutaan rupiah	Net Income					
Kode Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EPMT	343.510	519.002	534.081	499.843	673.252	580.814
DUPM	39.271	73.326	93.490	103.668	6.977	(334.841)
JKON	179.976	149.527	329.371	243.291	255.658	202.283
AKRA	916.060	909.329	739.893	183.216	(311.385)	865.379
BOGA	2.462	5.462	11.699	6.051	11.642	9.828
MICE	37.785	2.430	1.176	1.708	930	34.333
APII	33.449	17.515	15.446	11.142	34.216	34.186
SDPC	3.594	9.353	6.956	9.250	16.014	7.880

1. Kondisi Beban Pajak Tangguhan Sub Sektor Perdagangan Besar

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi. Beban pajak tangguhan satu diantara indikator yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya pada periode tertentu dengan cara menanggihkan beban pajak penghasilan saat ini untuk dibayarkan dimasa mendatang tujuannya agar laba perusahaan tetap terlihat bagus pada periode tersebut.

Berikut hasil perhitungan beban pajak tangguhan pada perusahaan *Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019* disajikan pada tabel 4.12 :

Tabel 4.12
Beban Pajak Tangguhan (BPT) Perusahaan Sub Sektor
Perdagangan Besar Periode 2014-2019

BEBAN PAJAK TANGGUHAN							
EMITEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
EPMT	0,00%	-0,09%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,01%
DUPM	-0,11%	0,17%	-0,01%	0,16%	0,01%	0,12%	0,06%
JKON	0,18%	-0,09%	-1,05%	-0,07%	-0,64%	-0,97%	-0,44%
AKRA	-1,39%	-1,34%	-0,59%	-0,69%	-0,80%	-0,79%	-0,93%
BOGA	-2,49%	-2,97%	-0,25%	-0,12%	0,26%	1,25%	-0,72%
MICE	-0,01%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-3,39%	0,08%	-0,57%
APII	0,01%	0,02%	0,00%	-0,01%	0,03%	0,67%	0,12%
SDPC	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	0,10%	0,17%	0,05%
MEAN	0,01%	-0,07%	-0,02%	-0,03%	0,01%	0,07%	
MIN	-2,49%	-2,97%	-1,05%	-0,69%	-3,39%	-0,97%	
MAX	0,18%	0,17%	0,02%	0,16%	0,26%	1,25%	

Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Beban Pajak Tangguhan perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar pada tahun 2014 sebesar 0,01%. BPT terendah pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) sebesar -2,49% dan BPT tertinggi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,18% pada PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

Tahun 2015 rata-rata perkembangan BPT menurun menjadi -0,07% atau menurun sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2014. Tahun 2015 perusahaan Sub Perdagangan besar mengalami penurunan dalam melakukan beban pajak tangguhan. BPT terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar -2,97% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) dan BPT tertinggi yaitu sebesar 0,17% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM).

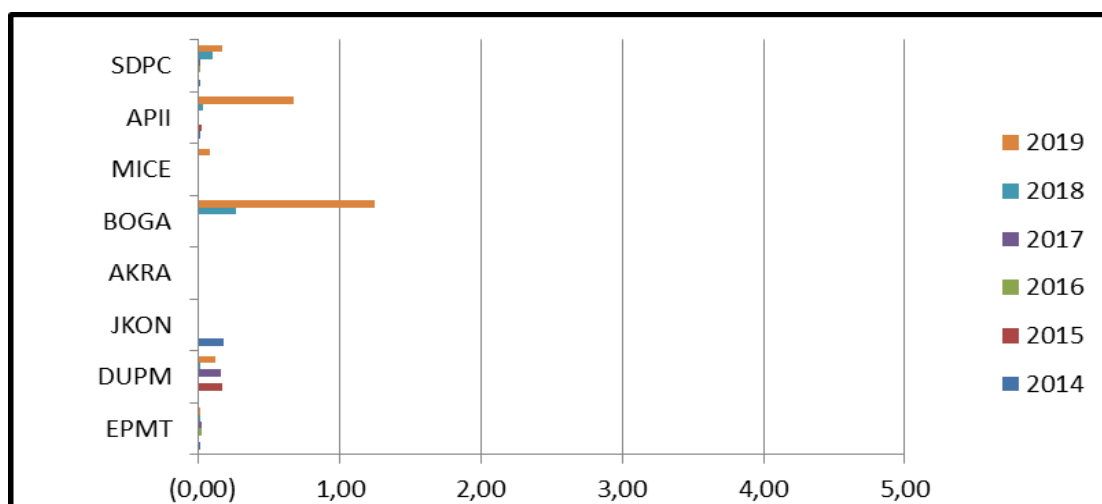
Tahun 2016 rata-rata perkembangan BPT menurun menjadi -0,02% atau naik sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2015. Tahun 2016 perusahaan Sub sector perdagangan besar mengalami penurunan kembali dalam melakukan beban pajak tangguhan hal ini mengindikasikan bahwa beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan dimasa mendatang juga berkurang. BPT terendah tahun 2016 yaitu sebesar -1,05% pada PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan BPT tertinggi yaitu sebesar 0,02% pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT).

Tahun 2017 rata-rata perkembangan BPT naik diangka -0,03% pada tahun 2016 BPT terendah yaitu sebesar -0,69% pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan BPT tertinggi pada tahun 2017 pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM) yaitu sebesar 0,16%.

Tahun 2018 rata-rata perkembangan BPT meningkat menjadi 0,01% atau meningkat sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan dimasa mendatang juga akan bertambah. BPT tahun 2018 terendah yaitu sebesar -3,39% pada PT Multi Indocitra Tbk (MICE) dan BPT tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,26% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA).

Tahun 2019 rata-rata perkembangan BPT meningkat menjadi 0,07% atau meningkat sebesar 0,06 dibandingkan tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan dimasa mendatang juga akan bertambah. BPT tahun 2019 terendah yaitu sebesar -0,97% pada PT Millennium Pharmacon Tbk (SDPC) dan BPT tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,25% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan Beban Pajak Tangguhan pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014- 2018, maka dapat ditunjukkan melalui gambar 4.4 :



Gambar 4.4

Grafik Beban Pajak Tangguhan Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2019

Berdasarkan grafik pada gambar 4.4 dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan perusahaan Sub sektor perdagangan besar periode 2014-2019 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Fluktuasi nilai beban pajak tangguhan ini dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan juga mengalami fluktuasi sehingga berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Peningkatan beban pajak tangguhan akan berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan, karena semakin tinggi tingkat beban pajak tangguhan maka akan semakin tinggi juga tingkat manajemen laba tetapi jika beban pajak tangguhan perusahaan mengalami penurunan maka manajemen laba akan ikut menurun.

2. Kondisi *Tax Retention Rate* (TRR) Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar

Tax Retention Rate (TRR) atau tingkat retensi pajak digunakan untuk menganalisis seberapa besar perusahaan melakukan manajemen pajak dalam hal ini yaitu perencanaan pajak. TRR digunakan untuk menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan. Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Berikut hasil perhitungan *Tax Retention Rate* (TRR) pada perusahaan Sub sektor perdagangan besar di BEI periode 2014-2019 disajikan pada tabel 4.13 :

Tabel 4.13
Tax Retention Rate (TRR) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019

<i>Tax Retention Rate</i>							
EMITEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
EPMT	88,98%	94,54%	98,43%	107,88%	99,97%	89,87%	96,61%
DUPM	172,31%	593,55%	88,22%	131,91%	84,91%	102,96%	195,64%
JKON	83,14%	53,77%	80,56%	102,85%	81,18%	86,24%	81,29%
AKRA	157,41%	87,08%	89,91%	48,02%	105,03%	96,06%	97,25%
BOGA	68,48%	274,27%	92,79%	94,33%	99,72%	87,54%	119,52%
MICE	62,51%	92,17%	75,09%	78,67%	196,15%	134,78%	106,56%
APII	80,47%	62,50%	97,50%	89,99%	102,96%	87,56%	86,83%
SDPC	88,95%	88,72%	98,30%	95,42%	110,46%	67,56%	91,57%
MEAN	86,0%	90,4%	91,4%	94,9%	101,5%	94,07%	
MIN	62,5%	53,8%	75,1%	48,0%	81,2%	67,56%	
MAX	172,3%	274,3%	98,4%	131,9%	196,2%	134,78%	

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata *Tax Retention Rate* (TRR) perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar pada tahun 2014 sebesar 86,0% TRR terendah pada tahun 2014 di PT Multi Indocitra Tbk (MICE) sebesar 62,5%, sedangkan TRR tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 172,31% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM).

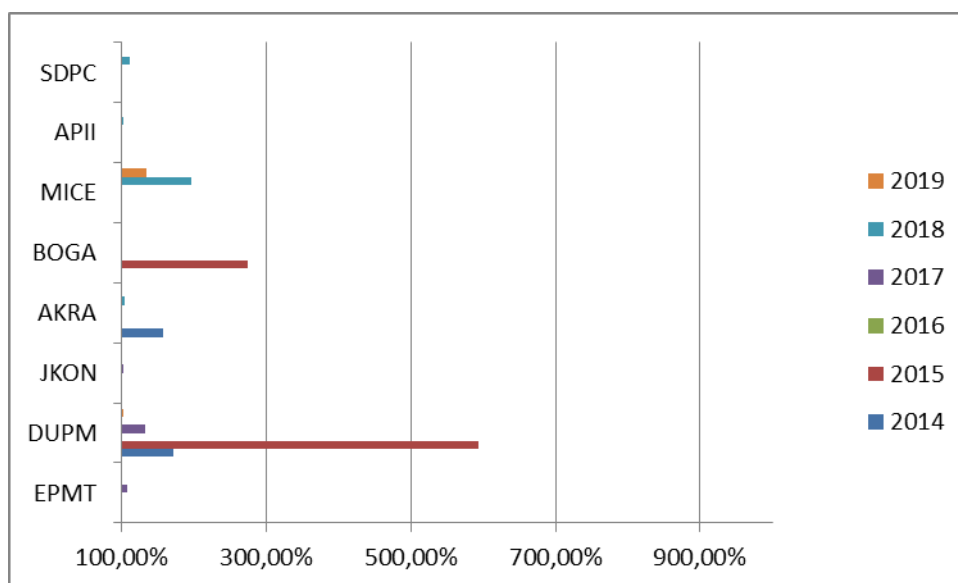
Tahun 2015 rata-rata perkembangan TRR naik menjadi 90,4% artinya tingkat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba juga naik. TRR terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 53,77% pada PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), sedangkan TRR tertinggi yaitu sebesar 274,27% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). Tahun 2016 rata-rata perkembangan TRR menurun menjadi 91,4% dibandingkan tahun 2015 artinya tingkat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba juga naik. TRR terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,09% pada PT Multi Indocitra Tbk (MICE), sedangkan TRR tertinggi yaitu sebesar 98,30% pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT).

Tahun 2017 rata-rata perkembangan TRR meningkat menjadi 94,9% artinya tingkat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba juga mengalami kenaikan. TRR terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 48,0% pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), sedangkan TRR tertinggi yaitu sebesar 131,9% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM).

Tahun 2018 rata-rata perkembangan TRR naik menjadi 101,5% artinya tingkat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba juga mengalami kenaikan. TRR terendah pada PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) tahun 2018 yaitu sebesar 81,2%, sedangkan TRR tertinggi yaitu sebesar 196,2% pada PT Multi Indocitra Tbk (MICE)

Tahun 2019 rata-rata perkembangan TRR menurun menjadi 94,07% artinya tingkat perencanaan pajak perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba juga mengalami kenaikan. TRR terendah pada PT Millennium Pharmacon International Tbk Tbk (SDPC) tahun 2019 yaitu sebesar 67,56%, sedangkan TRR tertinggi yaitu sebesar 134,78% pada PT Multi Indocitra Tbk (MICE)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan *Tax Retention Rate* pada perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* periode 2014- 2018, maka dapat ditunjukkan melalui gambar 4.5 :



Gambar 4.5

Grafik *Tax Retention Rate* (TRR) perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019

Berdasarkan grafik pada gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa *Tax Retention Rate* perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014-2019 mengalami keadaan yang meningkat. Peningkatan nilai perencanaan pajak atau *Tax Retention Rate* ini dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan juga mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Peningkatan perencanaan pajak akan membantu perusahaan untuk mengurangi laba sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tetap dalam keadaan minimal.

3. Kondisi Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar
Manajemen laba diukur dengan menggunakan model berbasis *distribution of earning after management* berdasarkan *scaled earnings changes* atau distribusi laba. Pendekatan ini dilakukan dengan cara pengujian statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

Berikut hasil perhitungan manajemen laba dengan menggunakan *scaled earnings change* pada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar di BEI periode 2014- 2018 disajikan pada tabel 4.14 :

Tabel 4.14

Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019

MANAJEMEN LABA							
EMITEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	MEAN
EPMT	1,02%	6,47%	-11,50%	0,87%	24,73%	16,87%	6,41%
DUPM	-27,01%	44,95%	29,27%	-62,33%	21,08%	-40,98%	-5,84%
JKON	1,45%	-6,83%	7,51%	-0,78%	1,20%	6,50%	1,51%
AKRA	12,49%	-3,49%	6,25 %	-10,08%	4,27%	9,85%	3,22%
BOGA	-11,01%	-10,91%	21,20%	-20,69%	64,24%	45,87%	14,78%
MICE	-0,20%	-61,11%	-1,81%	0,46%	3,13%	10,76%	-8,13%
APII	2,24%	-2,59%	2,20%	4,38%	-10,64%	5,34%	0,16%
SDPC	11,99%	8,18%	7,54%	0,57%	-5,56%	-7,87%	2,48%
MEAN	-1,13%	-3,17%	7,58%	-10,95%	12,81%	5,79%	
MIN	-27,01%	-61,11%	-11,50%	-62,33%	-10,64%	-40,98%	
MAX	12,49%	44,95%	29,27%	4,38%	64,24%	45,87%	

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata manajemen laba perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* pada tahun 2014 sebesar 1,13%. Manajemen laba terendah pada tahun 2014 pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) sebesar -11,01%, sedangkan manajemen laba tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 12,49% pada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Tahun 2014 rata-rata perkembangan manajemen laba menurun menjadi -2,04% atau menurun dibandingkan tahun 2013 artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menurun. Manajemen laba terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar -61,11% pada PT Multi Indocitra Tbk (MICE), sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 45,0% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM).

Tahun 2015 rata-rata perkembangan manajemen laba meningkat menjadi -2,04% atau menurun dibandingkan tahun 2014 artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan meningkat. Manajemen laba terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar -11,50% pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 29,3% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM).

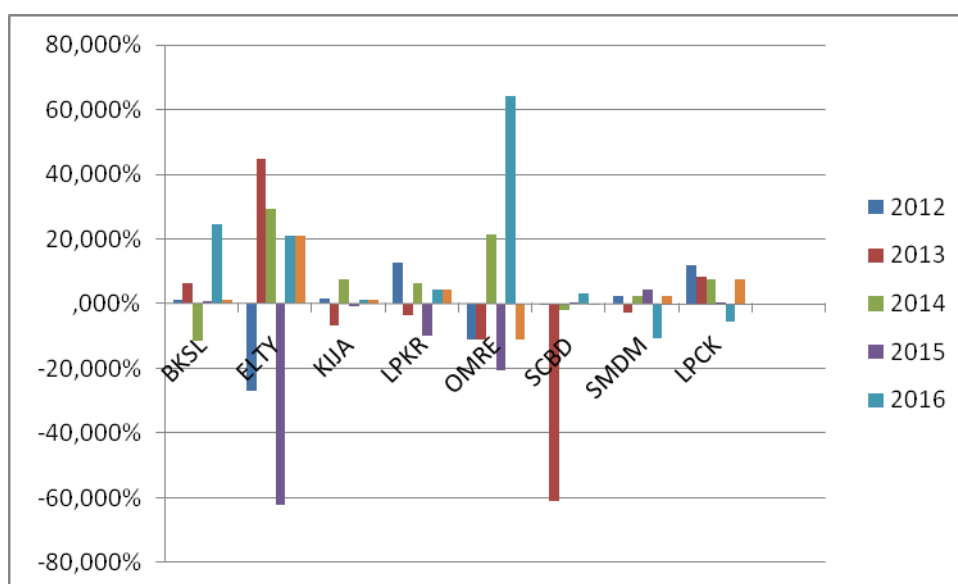
Tahun 2016 rata-rata perkembangan manajemen laba meningkat menjadi 10,75% atau meningkat dibandingkan tahun 2015 artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan meningkat. Manajemen laba terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar -62,3% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM), sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 4,4% pada PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII).

Tahun 2017 rata-rata perkembangan manajemen laba menurun menjadi -18,53% artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menurun. Manajemen laba terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar -62,33% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM) sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 4,38% pada PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII).

Tahun 2018 rata-rata perkembangan manajemen laba meningkat menjadi 23,76% artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menurun. Manajemen laba terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar -62,33% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM) sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 4,38% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA).

Tahun 2019 rata-rata perkembangan manajemen laba meningkat menjadi 23,76% artinya tingkat manajemen laba dalam upaya merekayasa laba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menurun. Manajemen laba terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar -62,33% pada PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DUPM) sedangkan manajemen laba tertinggi yaitu sebesar 4,38% pada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata perkembangan manajemen labapada perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar periode 2014- 2018, maka dapat ditunjukkan pada gambar 4.6 :



Gambar 4.6

Grafik Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Periode 2014-2019

Berdasarkan grafik pada gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa manajemen labaperusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* periode 2014-2019 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Hal ini dibuktikan nilai manajemen laba perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* periode 2014-2019 berada dalam keadaan positif dan negatif. Berdasarkan Dody Frans (2015), nilai deteksi manajemen laba dapat bernilai positif atau negatif, manajemen laba berada dititik lebih dari nol atau positif berarti menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba dan manajemen laba berada dititik kurang dari nol atau negatif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola penurunan laba.

4.3. Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukan pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada 8 perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di BEI periode 2014-2019 yang menggunakan alat bantu SPSS versi 24.0 tentang pengaruh ketepatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan (X_1) terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beban pajak tangguhan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dalam hal ini berarti jika variabel beban pajak tangguhan mengalami kenaikan maka variabel manajemen laba tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perubahan beban pajak tangguhan tidak menjamin tindakan manajemen laba oleh perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa manajemen perusahaan tidak memanfaatkan beban pajak tangguhan untuk melakukan manajemen laba, yaitu karena adanya keterkaitan yang erat antara beban pajak tangguhan dengan ketentuan perpajakan, maksudnya bila manajer memanfaatkan beban pajak tangguhan pada laporan komersial untuk melakukan manajemen laba maka hal ini dapat berimbas pada laporan keuangan fiskal sehingga manajer harus berpikir agar kecilnya beban pajak tangguhan tidak merugikan perusahaan karena hal tersebut berpengaruh terhadap liabilitas pajak tangguhan perusahaan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Budi Setyawan (2015) bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Perencanaan Pajak (X_2) terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan pajak dengan menggunakan proksi *Tax Retention Rate* dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dalam hal ini berarti jika variabel *Tax Retention Rate* mengalami kenaikan maka variabel manajemen laba akan mengalami kenaikan juga.

Salah satu tujuan perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktek manajemen laba. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Jadi dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat memperkecil jumlah laba perusahaan untuk dapat memperoleh keuntungan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap UU perpajakan yang berlaku, sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk mengurangi besarnya beban pajak penghasilan, sementara itu kondisi perencanaan

pajak pada perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* tahun 2014-2019 mengalami peningkatan hal ini diikuti juga dengan kenaikan manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan satu diantara motivasi manajemen laba (*Taxation Motivation*) yang dikemukakan oleh Sulistyanto (2008, 63), perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ketut Wirasantana (2013) bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan (X_1) dan Perencanaan Pajak (X_2) terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Akan tetapi pada saat dilakukan penelitian secara terpisah beban pajak tangguhan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan perencanaan pajak dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut dapat terjadi dengan kemungkinan nilai perencanaan pajak yang disajikan pada saat penelitian dapat menutupi nilai beban pajak tangguhan yang tidak mempengaruhi, sehingga pada saat penelitian dilakukan dapat menghasilkan nilai yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dikatakan bahwa peranan perencanaan pajak lebih besar dalam penelitian ini, hal ini di perkuat dengan hasil uji determinasi yang disajikan pada tabel 4.6, diperoleh nilai *R Square* (R^2) adalah sebesar 0,254.

Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi setiap variabel independen BPT dan TRR mampu menjelaskan variabel dependen Manajemen Laba yang diproksikan oleh *Scaled Earnings Change* sebesar 0,254 atau 25,4% sedangkan sisanya sebesar 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Variabel independen BPT dan TRR memiliki nilai yang jauh lebih rendah yaitu 25,4% dikarenakan hanya nilai perencanaan pajak yang mempengaruhi manajemen laba dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhandan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan *Sub Sektor Perdagangan Besar* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban pajak tangguhan (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,541 atau ($0,541 > 0,05$). Manajemen perusahaan tidak memanfaatkan beban pajak tangguhan untuk melakukan manajemen laba, yaitu karena adanya keterkaitan yang erat antara beban pajak tangguhan dengan ketentuan perpajakan, maksudnya bila manajer memanfaatkan beban pajak tangguhan pada laporan komersial untuk melakukan manajemen laba maka hal ini dapat berimbas pada laporan keuangan fiskal sehingga manajer harus berpikir agar kecilnya beban pajak tangguhan tidak merugikan perusahaan karena hal tersebut berengaruh terhadap liabilitas pajak tangguhan perusahaan dan menimbulkan kecurigaan bagi investor.
2. Perencanaan pajak secara parsial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 atau ($0,004 < 0,05$). Hal itu dikarenakan tingkat perencanaan pajak selama tahun 2014-2019 cukup besar sehingga hal ini mengindikasikan manajer perusahaan melakukan praktik manajemen laba untuk memperkecil laba agar beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga menurun atau berusaha untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.
3. Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dan manajemen laba secara simultan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 atau ($0,009 < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya indikasi perusahaan menggunakan manajemen laba dalam penentuan labanya, akan tetapi peneliti tidak bisa memastikan secara penuh bahwa perusahaan yang peneliti jadikan objek penelitian tersebut menggunakan manajemen laba, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba dalam satu perusahaan, seperti: Penentuan *Allowance expected credit loss*, Imabaln Pasca Kerja, *Accrued Expense*, dan masih banyak lagi. Peneliti memberikan adanya indikasi manajemen laba jika indikatornya Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variable independennya tidak hanya beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak, karena manajemen laba banyak sekali factor yang dapat dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba yang melanggar pedoman perpajakan dan pedoman akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selain itu juga peneliti selanjutnya bisa menambah jangka waktu periode penelitian menjadi 10 atau 15 tahun agar mendapatkan angka yang lebih valid.

2. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan manajemen laba karena, dampaknya sangat besar jika manajemen salah dalam mengalasis laba perusahaan. Jangan sampai perusahaan melakukan manajemen laba akan tetapi perusahaan juga melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu peraturan perpajakan ataupun peraturan akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan PSAK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok (2016), *Perpajakan*, Bandung, Mega Rancage Press.
- Bambang Wahyudiono (2010), *Memahami Laporan Keuangan*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses.
- Belkaoui Ahmed Riahi (2012), *Teori akuntansi*, Edisi Kelima. Alih bahasa: Ali Akbar Yulianto, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Budi Setyawan (2015), *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Jakarta, Universitas Mercubuana.
- Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey (2010), *Deteksi Kecurangan Akuntansi "The Financial Final Game"*. Alih bahasa: Aurolla Saparini Harahap, Jakarta, Penerbit PPM.
- Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung (2015), *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syafrri (2013), *Teori Akuntansi*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Harnanto (2013), *Perencanaan Pajak*, BPFY-Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2015), *Standar Akuntansi Keuangan: per 1 Januari 2015*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ketut Wirasantana Dewa (2013), *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba*, Universitas Udayana.
- Perwita, Andarumi Mustikaning (2014), *Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013*, Universitas Setia Budi Surakarta
- Phillips, John., M. Pincus and S. Rego (2003), "Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense". *The Accounting Review*, vol 78.
- Pohan, Chairil Anwar (2013), *Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*, Jakarta, Gramedia
- Pohan, Chairil Anwar (2015), *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia
- Pungky Lukman (2013), *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi Ukuran Manajemen Laba*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Scot, William R (2000), *Financial Accounting Theory 2nd Edition*. Scarrborough Ontario: Prentice Hall Canada, Inc.

Suandy, Early (2008), *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Suandy, Early (2011), *Perencanaan Pajak*, Edisi Kelima, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Sudana, I Made (2011), *Manajemen Keuangan Perusahaan (Teori dan Praktik)*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Sukardji, Untung (2015), *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, Grafindo Persada.

Sulistiyanto, H. Sri (2008), *Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*. Jakarta, Penerbit Grasindo.

Sumarsan, Thomas (2017), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo (2010), *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi 10, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Watt, R.L., and Zimmerman J.L. (1990), *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*, *The Accounting Review*, Vol 65, No.1.

Yulianti (2005), *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, No. 1: pp. 107-129.

Zain, Mohammad (2007), *Manajemen Perpajakan*, Edisi Ketiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

www.idx.co.id. www.sahamok.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Ma'rup
Alamat : Kp. Kreteg RT 03 RW 02 Kelurahan Padasuka
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 16610
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 19 September 1995
Agama : Islam
Pendidikan :
• SD : SDN Ciomas 2
• SMP : SMP Maarif NU Ciomas
• SMA : SMK Informatika Bina Generasi
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2021

Peneliti,

Syaiful Ma'rup

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Rasio Pajak Tangguhan

Perusahaan	Tahun	Pajak Tangguhan	Total Aset	DTE it
EPMT	2013		5.528.067	
	2014	671.991	6.005.123	12,156%
	2015	4.603	6.474.936	0,077%
	2016	43.440	7.087.269	0,671%
	2017	44.358	7.425.800	0,626%
	2018	39.982	8.322.960	0,538%
	2019	57.648	8.704.958	
DUMP	2013		145.770	
	2014	38	310.942	0,026%
	2015	83	1.575.467	0,027%
	2016	71	1.686.051	0,005%
	2017	1.561	2.079.476	0,093%
	2018	2.031	2.106.989	0,098%
	2019	110.481	1.820.802	5,244%
JKON	2013		3.417.012	
	2014	45.670	3.844.756	1,337%
	2015	58.361	2.775.957	1,518%
	2016	70.407	4.007.387	2,536%
	2017	44.398	4.202.515	1,108%
	2018	51.919	4.804.256	1,235%
	2019	43.457	4.928.108	0,905%

Perusahaan	Tahun	Pajak Tangguhan	Total Aset	DTE it
AKRA	2013		14.633	
	2014	46.760	14.792	319,549%
	2015	37.322	15.203	252,313%
	2016	12.262	15.831	80,654%
	2017	18.073	16.823	114,164%
	2018	18.582	19.941	110,455%
	2019	24.401	21.409	122,367%
BOGA	2013		53.636	
	2014	39.706	125.604	74,029%
	2015	41.143	167.598	32,756%
	2016	33.455	431.920	19,961%
	2017	55.889	520.241	12,940%
	2018	53.293	571.901	10,244%
	2019	50.284	579.936	8,792%
MICE	2013		628.738	
	2014	11.521	664.178	1,832%
	2015	9.846	761.521	1,482%
	2016	8.924	848.612	1,172%
	2017	10.251	863.182	1,208%
	2018	8.746	928.832	1,013%
	2019	9.617	1.039.470	1,035%
APII	2013		296.071	
	2014	7.630	439.888	2,577%
	2015	5.455	421.872	1,240%
	2016	4.290	407.985	1,017%
	2017	5.026	423.181	1,232%
	2018	4.240	450.303	1,002%
	2019	5.296	490.860	1,176%

Perusahaan	Tahun	Pajak Tangguhan	Total Aset	DTE it
SDPC	2013		471.677	
	2014	9.193	529.991	1,949%
	2015	8.575	663.217	1,618%
	2016	7.713	733.443	1,163%
	2017	11.140	938.005	1,519%
	2018	11.232	1.192.891	1,197%
	2019	8.186	1.230.844	0,686%

Lampiran 2. Indikator Rasio Perencanaan Pajak

Perusahaan	Tahun	Net Income	Pretax Income	TRR
EPMT				
	2014	343.510	480.272	71,524%
	2015	519.002	726.900	71,399%
	2016	534.081	745.576	71,633%
	2017	499.843	684.757	72,996%
	2018	673.252	868.232	77,543%
	2019	580.814	801.391	72,476%
DUMP				
	2014	39.271	48.171	81,524%
	2015	73.326	92.004	79,699%
	2016	93.490	119.100	78,497%
	2017	103.668	139.394	74,370%
	2018	6.977	11.721	59,526%
	2019	(334.841)	(443.739)	-75,459%

Perusahaan	Tahun	Net Income	Pretax Income	TRR
JKON				
	2014	179.976	319.509	56,329%
	2015	149.527	291.109	51,365%
	2016	329.371	402.068	81,919%
	2017	243.291	354.886	68,555%
	2018	255.658	320.148	79,856%
	2019	202.283	258.217	78,338%
AKRA	2014	916.060	993.343	92,220%
	2015	909.329	1.317.020	69,044%
	2016	739.893	1.118.546	66,148%
	2017	183.216	1.126.408	16,266%
	2018	(311.385)	890.156	-34,981%
	2019	865.379	899.083	96,251%
	BOGA			
2014		2.462	3.252	75,707%
2015		5.462	6.510	83,902%
2016		11.699	12.693	92,169%
2017		6.051	11.774	51,393%
2018		11.642	18.985	61,322%
2019		9.828	17.651	55,680%
MICE				
	2014	37.785	4.644	813,630%
	2015	2.430	3.785	64,201%
	2016	1.176	1.854	63,430%
	2017	1.708	2.622	65,141%
	2018	930	2.489	37,364%
	2019	34.333	45.193	75,970%

Perusahaan	Tahun	Net Income	Pretax Income	TRR
AII				
	2014	33.449	44.179	75,712%
	2015	17.515	26.209	66,828%
	2016	15.446	22.605	68,330%
	2017	11.142	19.161	58,149%
	2018	34.216	40.586	84,305%
	2019	34.186	34.250	99,813%
SDPC				
	2014	3.594	10.248	35,070%
	2015	9.353	16.773	55,762%
	2016	6.956	17.247	40,332%
	2017	9.250	20.674	44,742%
	2018	16.014	28.590	56,013%
	2019	7.880	11.969	65,837%